

Analisis Kapabilitas Efektif guna Melaksanakan Operasi Militer dalam Kontra Insurjensi di Wilayah Papua

Analysis of Effective Capabilities to Conduct Military Operations in Counterinsurgency in the Papua Region

**Stellar Nube Mella¹, Fauziah Gustarina Cempaka Timur²,
Pujo Widodo³**

^{1,2,3}Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi
Pertahanan, Universitas Pertahanan

Email: stellarmella3@gmail.com

Article Info

Received: September 21, 2023

Revised: December 12, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Gray argues that a good strategy must be realistic and implementable in accordance with the available means. This study aims to analyze the capabilities needed to carry out military operations effectively to support the implementation of counterinsurgency. The research method used in writing this article is a qualitative research method with literature study which is carried out by collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research topic and then critically analyzed in order to answer research questions related to security force capabilities needed in the context of counterinsurgency, especially in the Papua region to support the implementation of the national defense strategy. The results of this study found that the capabilities needed include; Information Operations capabilities, intelligence capabilities, land and coastal (sea and air) border guarding capabilities, tactical air mobility to support movement, and troops with special capabilities in arresting/enforcement of HVT (High Value Target). In addition, there are also institutional capabilities that need to exist i.e civil governance or capabilities, institutional management capacity, harmonized command and control, logistics, and robust the justice system and law enforcement.*



Keywords: *Capability, Counterinsurgency, Military Operation Other than War*

Abstrak: *Gray berpendapat bahwa strategi yang harus realistis dan dapat diimplementasikan sesuai dengan sarana yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas yang diperlukan guna melaksanakan operasi militer secara efektif yang mendukung implementasi penanggulangan insurjensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dianalisis secara kritis guna menjawab pertanyaan penelitian terkait kapabilitas militer yang dibutuhkan di dalam konteks peperangan asimetris khususnya di wilayah Papua guna mendukung implementasi strategi pertahanan nasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas yang diperlukan mencakup kemampuan dan kompetensi Operasi Informasi, kemampuan intelijen, kemampuan penjagaan wilayah perbatasan darat dan coastal (laut dan udara), mobilitas udara taktis untuk menunjang pergerakan, serta pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/penindakan HVT (High Value Target). Selain kemampuan-kemampuan tersebut, terdapat kapabilitas institusi yang perlu ada yaitu; kapabilitas civil governance atau pemerintahan, kapasitas manajemen kelembagaan, komando dan pengendalian yang sinergis, logistik, serta sistem peradilan dan penegakan hukum.*

Kata kunci: *Kapabilitas, Kontrainsurjensi, Operasi Militer Selain Perang*

Pendahuluan

Menurut Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia keluaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh pemerintah adalah separatis dan pemberontak bersenjata atau yang lebih dikenal sebagai insurjensi.¹ Insurjensi dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan terorganisir yang bertujuan untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah lewat aksi subversif dan kekerasan bersenjata.² Dengan kata lain, insurjensi merupakan suatu gerakan terorganisir perlawanan politik-militer yang berlarut yang bertujuan untuk melemahkan kontrol dan legitimasi dari suatu pemerintahan yang sah atas suatu wilayah.

¹ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), p. 22-23

² David Kilcullen, *Counterinsurgency* (New York: Oxford University Press, 2010), p.1

Insurgensi separatisme dapat diartikan sebagai suatu gerakan insurgensi yang dilakukan oleh kelompok atau gerakan yang berusaha untuk mendirikan entitas politik independen atau memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Pihak separatis yang terlibat dalam insurgensi separatisme umumnya memiliki tujuan politik yaitu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan penuh bagi wilayah atau kelompok etnis tertentu di dalam negara yang lebih besar³. Gerakan insurgensi juga berupaya untuk merebut kendali atas suatu wilayah, ini termasuk kendali atas populasi dan segenap sumber daya yang berada di dalam cakupan wilayah tersebut⁴.

Insurgensi terjadi dikarenakan adanya suatu *grievance* atau ketidakpuasan yang didasarkan pada persepsi adanya ketidakadilan atau diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat yang dimana kelompok yang termarjinalkan tersebut beranggapan bahwa proses politik biasa tidak dapat mengantarkannya ke dalam mencapai tujuan politik yang diharapkan sehingga aksi bersenjata dan subversi menjadi cara alternatif.

Ketidakpuasan tersebut kemudian diidentifikasi dan dipublikasikan oleh pihak atau kelompok insurgensi untuk menggalang dukungan dari suatu kelompok populasi. Dukungan tersebut diperoleh lewat penciptaan suatu narasi yang menjustifikasi dan melegitimasi tindakan serta *cause* (alasan bertindak) pihak insurjen⁵.

Selain sebagai suatu bentuk ancaman aktual yang dihadapi oleh negara saat ini, sepanjang sejarahnya, Indonesia telah menghadapi beberapa gerakan insurgensi terorganisir antara lain; DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), PRRI/PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta), RMS (Republik Maluku Selatan), dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso, serta OPM/TPNPB (Organisasi Papua Merdeka/ Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat).

Insurgensi yang masih bergulir di Indonesia hingga saat ini adalah gerakan insurgensi yang terjadi di wilayah Papua. Insurgensi yang terjadi di wilayah Papua merupakan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka. OPM merupakan suatu gerakan

³ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurgensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 21

⁴ US Government/ Central Intelligence Agency, *A Guide to the Analysis of Insurgency* (2012), p. 1, <https://www.hsdl.org/?view&did=713599>

⁵ David Ucko dan Thomas A. Marks, *Crafting Strategy for Irregular Warfare: A Framework for the Analysis and Action Second Edition* (Washington DC: NDU Press, 2022), p. 27

perlawanan yang memiliki resiliensi yang cukup tinggi. Organisasi tersebut merupakan kumpulan dari organisasi perlawanan politik dan bersenjata yang terdesentralisasi yang hanya beroperasi di dalam wilayah-wilayah tertentu. Faksi politik OPM terdiri atas beberapa organisasi, masing-masing dengan cakupan tugas serta wilayah operasinya sendiri yaitu KNPB (Komite Nasional Papua Barat), WPNA (*West Papua National Authority*), WPNCL (*West Papua national Council for Liberation*), serta ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Faksi bersenjata (TPNPB-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) terdiri atas komando lokal dengan kontrol teritorial terbatas yang beroperasi secara independen terhadap satu sama lain. Walaupun demikian, upaya koordinasi dan penyatuan secara berkala antar komando-komando lokal tersebut cenderung gagal⁶.

Penanggulangan insurjensi di Indonesia khususnya di wilayah Papua tidak kunjung selesai dengan banyaknya aksi penyerangan baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. Dilansir dari pemberitaan media, dari tahun 2020 - 2021 terdapat 141 kali penyerangan dengan korban aparat keamanan yang gugur berjumlah 26 anggota TNI-Polri⁷. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 90 kali penyerangan dengan korban sipil yang meninggal berjumlah 35 orang, dan TNI-POLRI yang gugur sebanyak 13 orang (10 prajurit TNI/ 3 anggota Polri)⁸. Pada semester I tahun 2023 (sampai dengan bulan Juli) terdapat 75 kasus penyerangan dengan estimasi korban jiwa berjumlah 15 - 17 orang yang terdiri dari prajurit TNI-Polri dan warga sipil⁹.

Banyaknya kasus penyerangan yang terjadi baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat keamanan (TNI-POLRI) tersebut memantik pertanyaan terkait kapabilitas atau kemampuan pemerintah khususnya aparat keamanan di dalam mengimplementasikan strategi kontra insurjensi yang efektif. Di Dalam kajian terkait kesiapan TNI

⁶ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storage-services/service/gdc/gdc-covop/2017344154/2017344154.pdf>

⁷ "Daftar Personel TNI dan Polri yang Gugur di Papua Sejak 2020." BeritaSatu, Januari 27, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=wEmjep9GkIs>

⁸ "13 Anggota TNI - Polri Gugur di Papua Selama 2022, Warga Sipil Meninggal 35 Orang." Liputan6, Desember 29, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5166206/13-anggota-tni-polri-gugur-di-papua-selama-2022-warga-sipil-meninggal-35-orang>

⁹ Abdul Malik Mubarok, "Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas," *Sindonews*, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>

(khususnya matra darat) guna menghadapi ancaman asimetris berupa insurjensi, terdapat beberapa kesenjangan kapabilitas (*capability gap*) yang teridentifikasi diantaranya kapabilitas intelijen (pengumpulan informasi) dan kapabilitas tempur yang masih harus dibenahi agar benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam konteks penanggulangan insurjensi¹⁰. Tanpa adanya penguasaan kapabilitas-kapabilitas tersebut, upaya penanggulangan insurjensi tidak dapat dilaksanakan secara efektif sehingga permasalahan tersebut akan terus berlanjut dan berlarut-larut

Lykke menjabarkan bahwa terdapat 3 komponen dari strategi yang saling berkaitan yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) yang dimana *ways* dipengaruhi/ didikte oleh *means* (sarana yang tersedia/ tindakan yang mampu dilaksanakan) guna mencapai *ends*¹¹. *Means* atau sarana-prasarana yang tersedia bagi pihak kontrainsurjen di dalam menanggulangi insurjensi mencakup keseluruhan elemen kekuatan nasional yaitu diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi yang dapat digunakan untuk mencegah pihak insurjen di dalam mencapai tujuan politiknya (*ends*). Kapabilitas dapat dikategorikan sebagai *means* dan merupakan faktor yang sangat penting di dalam implementasi strategi. Kapabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai suatu efek operasional¹².

Dalam kontra insurjensi diperlukan kapabilitas yang dibentuk dan dikembangkan guna melaksanakan fungsi-fungsi yang mencakup pengamanan populasi dan infrastruktur, perebutan hati dan pikiran populasi, serta upaya pencarian, pengejaran dan penangkapan/pembasmian insurjen¹³. Guna melaksanakan tugas atau fungsi terkait penanggulangan insurjensi yang disebutkan diatas, terdapat beberapa bentuk kapabilitas yang perlu dimiliki dan dikembangkan sebagai contoh kapabilitas intelijen (baik kemampuan teknologi maupun HUMINT), territorial, pengamanan populasi, mobilitas, dan informasi¹⁴.

¹⁰ TNI AD. *Kajian Triwulan IV:Kesiapan TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Asimetris* (Bandung: Seskoad, 2010), p. 74-75

¹¹ Arthur F. Lykke Jr, "Defining Military Strategy," *Military Review*, 100, no. 5 (May 1989): 2-8.

¹² Aaron C. Taliaferro, Lina. M Gonzalez, Mark Tillman, Pritha Ghosh, Paul Clark, and Wade Hinkle, "Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP)," (February 2019): 1-4. <https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4>

¹³ David Kilcullen, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," in *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, ed. Paul B. Rich and Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 2012), p. 143

¹⁴ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*

Kapabilitas-kapabilitas tersebut krusial guna mengatasi kendala penanggulangan insurjensi di wilayah Papua. Kurang lebih, terdapat empat kendala didalam pelaksanaan kontra insurjensi secara efektif di wilayah Papua. Kendala pertama yaitu belum adanya kesatuan komando dan pengendalian yang mensinergikan upaya yang dilakukan berbagai organisasi pelaksana, mekanisme pengawasan dan evaluasi efektifitas keterlibatan berbagai satgas, serta metrik/ indikator efektivitas yang tepat¹⁵.

Kendala kedua adalah terbatasnya akses untuk menyusupkan maupun untuk merekrut sumber intelijen HUMINT dikarenakan faktor genealogi seperti loyalitas etnis maupun suku¹⁶. Ketiga, upaya identifikasi dan penangkapan sulit dilakukan karena kemampuan separatist bersenjata di dalam berbaur dengan masyarakat¹⁷. Upaya identifikasi dan penangkapan aktor separatist bersenjata juga dihambat oleh kondisi medan/ geografis yang sulit untuk dinavigasi oleh aparat yang digunakan oleh insurjen untuk bersembunyi¹⁸. Selain itu, aktor separatist bersenjata juga sering dilindungi oleh masyarakat pedesaan dikarenakan loyalitas dan dinamika suku (*tribal*)¹⁹.

Kendala-kendala tersebut menuntut pihak kontrainsurjen (dalam hal ini pemerintah) untuk beradaptasi dengan membentuk serta mengembangkan kapabilitas efektif yang dapat mengatasi kendala operasional dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk menganalisis kapabilitas yang dibutuhkan guna melaksanakan operasi militer yang mendukung pelaksanaan kontrainsurjensi efektif dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dari lingkungan operasi serta musuh yang turut menghambat upaya kontra insurjensi yang terjadi di wilayah Papua.

(Santa Monica: RAND Corporation, 2008).

¹⁵ Stefanus S. Aribowo, *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara* (Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022), p. 86-87

¹⁶ Stefanus S. Aribowo, *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara* (Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022), p. 86-87

¹⁷ Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 24

¹⁸ Johannes R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993)

¹⁹ Johannes R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Studi Pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Kemudian bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis dengan metode analisis data deduktif. Metode analisis data deduktif merupakan metode yang menganalisis data dengan memformulasikan suatu hipotesis dari teori-teori dan literatur yang ada yang kemudian diuji pada data yang tersedia. Metode analisis data deduktif digunakan di dalam artikel ini untuk pertama menjabarkan bentuk kapabilitas-kapabilitas yang dibutuhkan untuk menanggulangi insurjensi secara umum, dan kedua, untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kapabilitas militer yang dibutuhkan di dalam konteks penanggulangan insurjensi secara khusus di wilayah Papua

Telaah Teori

Upaya penanggulangan insurjensi merupakan *whole-of-government-effort* atau upaya dari keseluruhan suatu pemerintahan yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan (yang mencakup dinas intelijen, kepolisian, dan militer). Walaupun demikian, terdapat kapabilitas atau kemampuan khusus tertentu yang perlu dimiliki oleh suatu pemerintah agar dapat berfungsi secara efektif dalam penanggulangan insurjensi. Berikut beberapa literatur yang membahas dan mengelaborasi kapabilitas yang perlu dimiliki oleh pihak kontra insurjen yang mencakup teori-teori kapabilitas kontra insurjensi yang ditulis Gompert & Gordon IV (2008), Galula (1964), & Kilcullen (2012).

Gompert & Gordon IV (2008)

Menurut Gompert & Gordon IV (2008), terdapat 3 kategori kapabilitas yang perlu dimiliki oleh pihak kontrainsurjen yaitu kapabilitas *civil governance* atau pemerintahan, kapabilitas informasi, kapabilitas

kognisi/ mempengaruhi persepsi, serta kapabilitas keamanan (*general security capabilities*)²⁰.

1) Kapabilitas *civil governance* atau pemerintahan

Kapabilitas ini dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan strategi/ pendekatan-pendekatan lunak guna meraih dukungan dari masyarakat (upaya memenangkan hati dan pikiran). Kapabilitas-kapabilitas tersebut mencakup;

- 1.1) Keterampilan dan sumberdaya di dalam area-area fungsional yang mencakup: sistem politik/ pemerintah yang akomodatif dan stabil, administrasi pemerintahan, kesehatan dan pendidikan publik, lapangan pekerjaan, kebijakan ekonomi, sistem keuangan/ perbankan, transportasi, serta energi.
- 1.2) Kemampuan dalam mengkoordinasikan partisipasi berbagai organisasi baik unsur-unsur dari pihak pemerintah (pusat dan lokal), aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional.

2) Kapabilitas informasi

Gompert & Gordon IV (2008) mengemukakan bahwa kapabilitas informasi harus memprioritaskan *user requirements* atau kebutuhan pengguna informasi yaitu individu analis, pembuat strategi & kebijakan, serta pengambil keputusan baik yang berasal dari aparatur sipil-pemerintahan maupun dari aparat keamanan. Kebutuhan informasi tersebut pada umumnya mencakup *human terrain* (demografi, populasi, dan individu-individu), *physical terrain* (geografi), serta *hostile forces* (musuh).

Kapabilitas informasi mencakup kemampuan kontra insurjen didalam mendapatkan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna. Berikut cara serta kemampuan yang dibutuhkan guna menunjang kapabilitas informasi pihak kontra insurjen:

- 2.1) Mendorong dan memfasilitasi proliferasi penggunaan telepon seluler serta menghubungkan telepon seluler dengan pengguna terdaftar. Hal ini dapat mengakibatkan hal-hal berikut:
 - 1) peningkatan daya tanggap pemerintah terhadap suatu situasi
 - 2) lebih banyak mata yang dapat melacak dan merekam apa yang sedang terjadi

²⁰ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report - War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p.xxxviii - xxxix

- 3) kemampuan untuk menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti terutama mengenai rencana dan niat pemberontak (misalnya dengan menganalisis tanda penggunaan ponsel)
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pasukan pemerintah di lapangan.
 - 5) Menghadirkan dilema bagi para pemberontak (penggunaan ponsel membantu para pemberontak dalam berkoordinasi dan merencanakan, tetapi juga menyulitkan untuk bersembunyi).
- 2.2) Kemampuan menyusun sensus atau registrasi penduduk, distribusi kartu tanda penduduk atau identifikasi, serta *vetting*.
 Kapabilitas ini penting guna mengidentifikasi hubungan/ relasi antar individu, jenis pekerjaan/ okupasi, tingkat kesehatan, lisensi-lisensi, serta laporan-laporan insiden atau kejadian-kejadian tidak biasa. Identifikasi variabel-variabel tersebut bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan penduduk dan gerakan simpatisan atau terduga anggota kelompok insurjen.
- 3) Kapabilitas kognisi/ mempengaruhi persepsi
 Terdapat beberapa kapabilitas kognitif/ mempengaruhi persepsi yang harus dimiliki oleh pihak kontra insurjen yaitu;
 - 3.1) *Understanding* atau pemahaman terkait ideologi serta cause/ grievance dari gerakan insurjensi yang didasarkan pada penelitian empiris dan inovatif serta kepekaan terhadap psikologis pihak insurjen serta demografi atau populasi setempat.
 - 3.2) *Shaping*/ penggalangan berkaitan dengan kapabilitas dan upaya untuk mendapatkan public confidence/ kepercayaan publik, mengisolasi insurjen, serta upaya menghentikan siklus radikalisme serta regenerasi insurjensi. Agar berhasil, penggalangan yang efektif harus disertai dengan implementasi kebijakan dan program yang memiliki dampak *tangible*.
 - 4) Kapabilitas keamanan (*general security capabilities*).
 Upaya penanggulangan insurjensi tidak dapat berhasil hanya dengan bertumpu pada kapabilitas informasi dan pemerintahan. Guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta untuk menciptakan suatu kondisi yang mendukung upaya pembangunan/ penyelenggaraan pemerintah, pihak kontra insurjen perlu mengupayakan stabilisasi situasi keamanan lewat upaya-upaya yang berbasis keamanan (*security based*)

yang melibatkan penggunaan kekuatan (*use of force*)²¹. Berikut beberapa kapabilitas yang diperlukan oleh aparat keamanan dalam menanggulangi insurjensi;

4.1) Kapasitas manajemen kelembagaan

Kapabilitas pasukan keamanan sangat bergantung pada institusi atau struktur institusional yang berwenang di atasnya. Struktur institusional dalam hal ini pemerintah sipil bertanggung jawab dan harus memiliki kontrol penuh atas kompetensi dan perilaku pasukan keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks kontra insurjensi, efektivitas dan legitimasi suatu pemerintah beserta aparaturnya sangat bergantung/ dipengaruhi oleh otoritas/ institusi sipil yang menaunginya.

Gompert & Gordon IV (2008) mengatakan bahwa pada tingkat praktis/ pelaksana, kapabilitas institusi sipil yang memiliki otoritas atas perangkat atau aparaturnya sangat berpengaruh terhadap perencanaan, pengarahannya, dan pendanaan pelatihan, perlengkapan, struktur, dan penggunaan kekuatan aparaturnya tersebut (yang mencakup kepolisian/ penegakan hukum, serta unsur-unsur militer).

4.2) Komando dan pengendalian yang selaras/ bersinergi

Kontra Insurjensi merupakan upaya terkoordinasi dan melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi di dalam pemerintahan. Dikarenakan terdapat berbagai unsur pelaksana yang terdiri atas aparaturnya sipil/ pemerintahan serta aparat keamanan yang masing-masing memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda, harus ada suatu sistem komando dan pengendalian yang dapat menyelaraskan upaya-upaya (aksi taktis) dari unsur pelaksana tersebut agar menghasilkan suatu efek strategis yang relevan dengan tujuan politik yang ingin dicapai atau kebijakan yang ingin diterapkan.

Komando dan pengendalian di dalam kontra insurjensi berbeda dengan operasi militer konvensional. Secara khusus, diperlukan koordinasi yang sangat ketat antara kepolisian dan militer, yang dimana keduanya memerlukan akses terhadap *timely intelligence* atau informasi intelijen yang tepat waktu. Dalam beberapa situasi yang timbul di dalam dinamika kontra insurjensi, unsur militer

²¹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 175

mungkin diminta untuk mendukung kepolisian. Implikasi dari hal ini adalah terbentuknya suatu sistem komando dan pengendalian non-tradisional bagi pasukan militer (Gompert & Gordon IV, 2008). Selain itu aspek geografis juga sangat berpengaruh. Unsur militer yang tersebar di dalam unit-unit yang relatif kecil dengan cakupan geografis yang relatif sangat luas berdampak terhadap komando dan pengendalian yang dimana wewenang yang lebih besar diberikan kepada komandan-komandan unit kecil daripada yang terjadi dalam operasi militer konvensional.

4.3) Logistik

Logistik dalam penanggulangan insurjensi mencakup penyediaan makanan, bahan bakar, suku cadang, dan amunisi; serta pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana; dan pengelolaan material, aliran, fasilitas, dan sistem yang menghasilkan logistik yang tanggap. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, diperlukan infrastruktur yang memadai berupa depot, transportasi, dan bengkel pemeliharaan. Luas dan sifat infrastruktur akan bervariasi tergantung pada skala dan kebutuhan operasional. Pengiriman pasukan untuk mendukung upaya kontra insurjensi di daerah terpencil bisa jadi sulit. Pengiriman via transportasi udara dalam beberapa situasi mungkin lebih baik dan lebih aman daripada menggunakan moda transportasi darat.

4.4) Sistem peradilan dan penegakan hukum

Legitimasi pemerintah daerah (dan pusat) sangat dipengaruhi oleh sistem keadilan dan jaminan penegakan hukum yang adil. Tanpa sistem peradilan yang memadai dan efisien, pelanggaran hukum tidak dapat ditangani secara proporsional. Sistem peradilan yang tidak proporsional, adil, dan transparan dapat digunakan oleh pihak insurjen untuk meyakinkan suatu segmen populasi bahwa negara (pihak kontra insurjen) berperilaku diskriminatif dan tidak berpatokan pada sistem penegakan hukum yang adil. Tanpa suatu kejelasan sistem peradilan, kerjasama dan tindakan kooperatif dari masyarakat untuk mewujudkan situasi aman akan sulit tercapai.

4.5) Kemampuan dan kompetensi operasi informasi

Upaya operasi informasi yang dilakukan pihak kontra insurjensi harus terkoordinasi dan harus dapat mempengaruhi persepsi populasi dan khalayak lainnya. Pesan yang disampaikan harus dapat dimengerti dan beresonansi dengan masyarakat. Terdapat

dua komponen di dalam operasi informasi kontra insurjensi yaitu untuk menginformasikan dan mempengaruhi. Kontrainsurjen (dalam hal ini pemerintah) perlu merencanakan suatu pola diseminasi informasi yang efektif agar maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah dapat dimengerti oleh populasi/ masyarakat sehingga mencegah disinformasi dan spekulasi yang dapat berujung pada *civil unrest*.

4.6) Kepolisian/ penegakan hukum dan *constabulary* (kemampuan taktis paramiliter kepolisian)

Kepolisian dan sistem penegakan hukum yang efisien sangat krusial di dalam penanggulangan insurjensi. Polisi lokal, khususnya yang tinggal diantara masyarakat, cenderung menetap di daerah setempat, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi setempat. Polisi cenderung ditempatkan secara permanen di daerah tertentu. Mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari siapa “aktor jahat” di suatu wilayah—termasuk kelompok mana yang mungkin merupakan insurjen yang bermotivasi politik dan siapa yang merupakan penjahat biasa. Mereka (kepolisian) biasanya jauh lebih cocok untuk mengalahkan insurjen yang beroperasi kelompok kecil yang terdesentralisasi karena mereka mengenal masyarakat dengan baik dan dilatih untuk menggunakan kekerasan (*use of force*) secara diskriminatif.

Di Dalam situasi yang dimana pihak insurjen memiliki persenjataan dan kemampuan militer, pihak kepolisian pada umumnya tidak memiliki peralatan serta pelatihan yang khusus mempersiapkan mereka untuk menghadapi kontijensi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kapabilitas *constabulary* atau polisi paramiliter yang diorganisir, dilatih, dan diperlengkapi untuk berfungsi baik sebagai polisi atau sebagai unit tempur, atau sebagai gabungan dari keduanya dalam keadaan sulit dan kompleks. Kapabilitas ini umumnya berada di bawah kepolisian. Hal ini dikarenakan kapabilitas tersebut cenderung diciptakan untuk memudahkan tugas kepolisian, sebagai contoh suatu tempat persembunyian insurjen bersenjata lengkap ditemukan/ berhasil diketahui oleh penyelidik kepolisian. Guna melakukan penindakan atau penangkapan, kekuatan polisi regular tidak cukup untuk menangani persoalan tersebut dan cenderung membutuhkan pasukan dengan peralatan dan kemampuan yang mampu mengatasi perlawanan serius dari pihak insurjen.

4.7) Kemampuan intelijen

Kapabilitas untuk menemukan dan memantau gerakan dan aktifitas insurjen sangat penting—dan sulit karena insurjen biasanya mengenakan pakaian sipil, beroperasi dalam tim kecil, serta biasanya tidak menggunakan peralatan militer yang mudah diidentifikasi yang dapat diidentifikasi, dan sering bersembunyi di pemukiman penduduk/ di antara warga sipil.

Meskipun mode operasi insurjen tersebut membuat banyak platform ISR/IPP menjadi mubazir, ada beberapa jenis peralatan yang dapat membantu dalam memantau aktivitas insurjensi di lingkungan atau pemukiman yang padat penduduk diantaranya; alat surveillance elektronik, pesawat tak berawak (UAV), dan sensor jarak jauh. Data yang dihasilkan oleh *signals intelligence* (SIGINT), serta sensor darat dan udara perlu di proses, di analisis serta di diseminasi ke lembaga terkait guna meningkatkan efektifitas upaya kontra insurjensi.

Selain dari sumber-sumber teknis berupa platform ISR, sensor, alat surveilans elektronik, monitor frekuensi radio (RF), dan lain-lain, informasi intelijen juga dapat diperoleh dari sumber manusia atau jaringan HUMINT (*human intelligence*). Informasi dari sumber HUMINT dapat diperoleh lewat aparat-aparat keamanan seperti petugas intelijen, penyelidik, maupun aparat militer yang memiliki penguasaan budaya dan bahasa lokal dan memiliki jaringan atau lingkup sosial yang luas di dalam masyarakat tersebut. Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan informan, wawancara, serta teknik-teknik lain yang dapat membantu dalam mendapatkan informasi-informasi tertentu.

4.8) Keamanan perbatasan (baik darat dan laut)

Keamanan wilayah perbatasan memiliki dampak yang besar terhadap upaya kontra insurjensi. Pihak insurjen seringkali memanfaatkan kelengahan penjagaan di wilayah perbatasan untuk mendukung operasi-operasi sebagai contoh penciptaan wilayah aman atau *sanctuary area* di dalam wilayah negara lain yang sulit diakses oleh pihak kontra insurjen atau memungkinkannya transportasi logistik keperluan insurjen dari suatu negara ke negara tujuan. Oleh sebab itu, kapabilitas aparat keamanan dalam mengamankan dan mengadministrasi wilayah perbatasan sangat penting. Rincian terkait komposisi pasukan dan sistem spesifik yang diperlukan untuk mengamankan suatu perbatasan tertentu bervariasi secara signifikan tergantung pada faktor-faktor seperti

panjang perbatasan, medan/ geografi di daerah perbatasan, kepadatan penduduk di wilayah perbatasan, dan jumlah lalu lintas yang melewati perbatasan tersebut.

4.9) Mobilitas udara taktis

Pasukan keamanan yang terlibat dalam pemberantasan insurjensi seringkali memerlukan mobilitas udara. Insurjen biasanya memiliki inisiatif taktis (yaitu, mereka dapat dengan leluasa memutuskan kapan dan di mana akan melakukan serangan). Selain itu, pihak insurjen juga sering mengeksploitasi wilayah terpencil yang memiliki karakteristik medan yang sulit untuk dinavigasi/ dilalui dengan jalur darat. Oleh sebab itu pasukan kontra-insurjen memerlukan mobilitas udara agar tanggap terhadap perubahan situasi. Selain itu, sistem intelijen mungkin akan mendeteksi pergerakan kelompok insurjen (terutama para pemimpin inti kelompok insurjen) yang memerlukan respons cepat karena kesempatan interdiksi yang sangat singkat. Mobilitas udara juga memungkinkan pasukan kontra insurjen untuk tetap hadir dan tanggap di suatu cakupan wilayah yang luas tanpa harus mendirikan posisi-posisi tempat di seluruh wilayah tersebut.

4.10) Pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/ penindakan HVT (*High Value Target*)

Pasukan dengan kapabilitas khusus dapat melaksanakan tugas/ fungsi militer yang tidak sesuai atau tidak mampu dilaksanakan oleh pasukan konvensional ataupun polisi. Kapabilitas tersebut memungkinkan pasukan-pasukan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengintaian sasaran dengan risiko tinggi atau pengintaian jarak dekat, operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, dan penindakan langsung (*direct action*) terhadap sasaran terpilih (misalnya sasaran berupa unsur komando dan pengendalian pihak insurjen). Pasukan dengan kemampuan-kemampuan khusus tersebut juga dapat digunakan didalam aksi-aksi lintas perbatasan yang menasar area-area persembunyian insurjen yang berada di luar wilayah negara.

4.11) Serangan presisi

Kapabilitas serangan presisi memungkinkan pihak kontra insurjen untuk menemukan dan menghancurkan target dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kapabilitas ini sangat penting dalam konteks kontra insurjensi yang dimana kerusakan infrastruktur dan kematian warga sipil harus diminimalisir. Seringkali,

serangan-serangan presisi terhadap suatu sasaran dilakukan didalam suatu *time frame* atau rentang waktu yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan dalam banyak situasi target atau sasaran sedang bergerak sehingga dibutuhkan suatu cara serangan yang mempersingkat batasan waktu atau proses antara sensor-pengambilan keputusan-pelaksanaan tembakan. Serangan presisi dapat dilakukan dengan menggunakan amunisi meriam dan roket, amunisi presisi (munisi pintar) yang ditembakkan dari udara (via helikopter, UAV maupun alutsista udara lainnya), atau dari platform berbasis laut.

4.12) Pertempuran darat

Pasukan dengan kemampuan tempur di darat perlu ditugaskan bilamana situasi insurjensi sudah tidak terkendali dan tidak lagi dapat diatasi oleh pihak kepolisian dan polisi paramiliter (*constabulary/ gendarmerie*). Di Dalam kontrak insurjensi, kapabilitas yang diperlukan oleh pasukan tempur darat didasarkan pada misi atau operasi yang harus dilakukan yaitu;

- 1) Pengamanan defensive untuk mencegah kontrol insurjen atas wilayah tertentu
- 2) Pengamanan infrastruktur kritis/ objek vital
- 3) Kemampuan reaksi cepat dalam membantu pihak kepolisian yang ada di dalam situasi terdesak
- 4) Operasi-operasi ofensif seperti penyisiran daerah tertentu untuk menyita persenjataan insurjen, menghancurkan tempat perlindungan atau merebut kembali daerah yang telah jatuh di bawah kendali pihak insurjen.

Pergelaran pasukan darat sangat bergantung pada dua faktor dasar—yaitu faktor operasional dan faktor politik. Secara operasional, pasukan yang digelar harus memiliki jumlah personel yang cukup untuk mencegah upaya insurjen didalam mengintimidasi penduduk, menguasai wilayah penting, dan menyerang sasaran berupa infrastruktur kritis. Dukungan intelijen, kemampuan perorangan prajurit yang tinggi, serta ketersediaan mobilitas udara dapat menurunkan jumlah kebutuhan personel di lapangan.

Secara politis, kehadiran pasukan darat sangat bergantung pada penerimaan atau sikap penduduk lokal. Di daerah-daerah tertentu, para penduduk mungkin mendukung dan akomodatif terhadap kehadiran pasukan dalam jumlah yang besar, sedangkan kehadiran pasukan di daerah lainnya mungkin ditolak.

Galula (1964)

Kontra Insurgensi merupakan upaya kerjasama dan terkoordinasi antara militer, aksi polisionil/ penegakan hukum dan sistem peradilan, serta aparat pemerintahan (*governance*)²².

Penanggulangan insurgensi melibatkan upaya militer yaitu penghancuran terhadap pasukan insurjen, mencegah pemulihan organisasi mereka. Selain itu, keberadaan militer diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di antara penduduk serta melacak sisa-sisa pasukan gerilya pemberontak yang masih ada.

Selain upaya militer, penanggulangan insurgensi juga melibatkan kegiatan identifikasi, penangkapan, serta interogasi agen politik insurjen, mengadili serta merehabilitasi mereka yang dapat dikooptasi oleh pihak pemerintah. Ini dikategorikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan kepolisian dan hanya dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat kepolisian/ penegak hukum dan sistem peradilan.

Selain kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada pihak insurjen, kontra insurgensi juga melibatkan kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan yang mencakup; upaya menjalin kontak dengan penduduk, membentuk suatu struktur politik dan pemerintahan, serta melakukan upaya-upaya konstruktif yang diperlukan guna memenangkan dukungan (hati dan pikiran) dari masyarakat²³.

Agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa kapabilitas yang harus ada atau perlu dibentuk oleh suatu badan militer yang akan melaksanakan kontra insurgensi. Galula (1964) berpendapat bahwa pasukan bersenjata kontra insurjen harus menjalankan dua misi yang berbeda yaitu aksi ofensif terhadap kekuatan bersenjata insurjen, serta aksi/ misi pengamanan populasi dan wilayah. Dikarenakan kedua misi tersebut, pasukan kontra insurjen dapat diorganisasi menjadi dua jenis formasi yaitu: 1) unit-unit mobilitas tinggi untuk melakukan aksi ofensif, dan 2) unit-unit statis yang tinggal bersama penduduk untuk melindungi wilayah dan populasi serta menggalang dukungan. Unit-unit statis tersebut harus kompeten dalam memahami situasi lokal, penduduk, dan masalah-masalah lokal.

Pasukan bersenjata yang lazim digunakan sebagai pasukan utama (*main force*) di dalam kampanye kontra insurgensi adalah pasukan infanteri

²² David Galula, *Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice* (New York: Praeger, 1964), p. 61

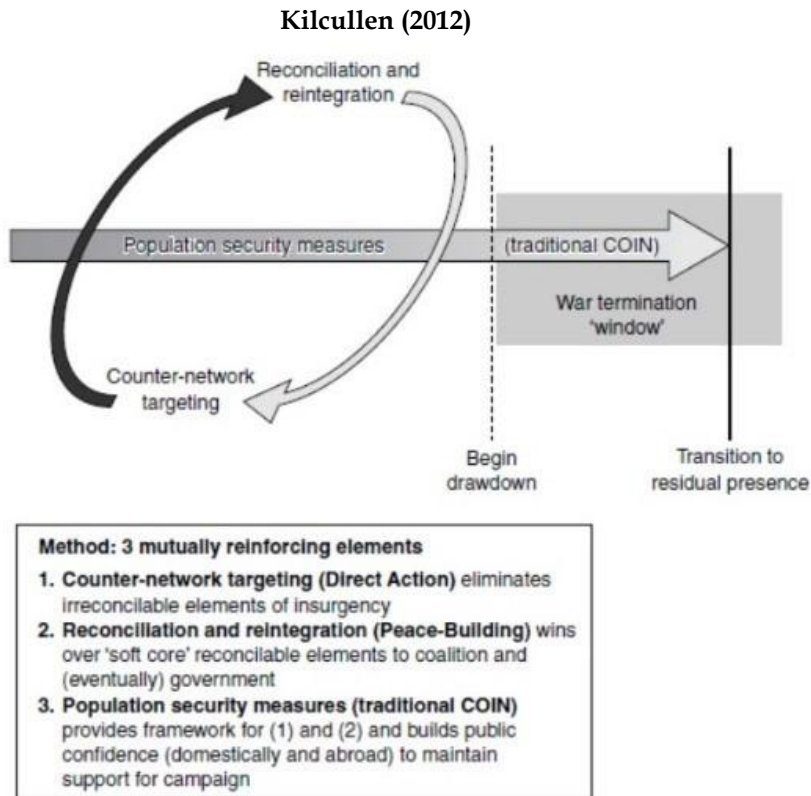
²³ David Galula, *Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice* (New York: Praeger, 1964), p. 62

yang memiliki mobilitas tinggi dan dipersenjatai dengan berbagai macam senjata ringan. Guna mendukung pasukan infanteri, militer didalam kontra insurjensi juga memerlukan beberapa alutsista bantuan pada umumnya sebagai dukungan tembakan dan untuk menunjang mobilitas.

Untuk memberikan dukungan tembakan, diperlukan artileri atau mortir yang dapat menyediakan bantuan tembak non-organik . Guna mendukung mobilitas pasukan infanteri, militer didalam kontra insurjensi juga harus diperlengkapi dengan kendaraan lapis baja, dan jika kondisi medan menguntungkan, kavaleri berkuda untuk pengawasan jalan dan patroli . Dari segi kekuatan udara pihak kontra insurjen membutuhkan pesawat dukungan darat dan pengamatan yang dapat terbang dengan kecepatan rendah, daya tahan tinggi, daya tembak besar, dilindungi dari tembakan senjata ringan dari tanah; ditambah pesawat angkut lepas landas pendek dan helikopter, yang memainkan peran penting dalam operasi penumpasan insurjensi . Menurut Galula (1964), walaupun tidak terlalu terlibat, angkatan laut memiliki beberapa peran dalam upaya kontra insurjensi yaitu terutama dalam penerapan blokade laut .

Walaupun “berperang” merupakan tugas pokok dan fungsi utama, pasukan bersenjata pihak insurjensi (khususnya pasukan statis) tidak hanya dituntut untuk melakukan aksi-aksi militer . Setelah kontestasi bersenjata antara insurjen dan pihak kontra insurjen (pemerintah) mereda atau berkurang intensitasnya, pasukan statis akan dihadapkan pada situasi yang dimana mereka diharuskan untuk melakukan tugas-tugas non militer . Ini diakibatkan kurangnya personil-personil sipil dan administratif/ pemerintahan di daerah rawan. Tugas-tugas non-militer tersebut mencakup: pelaksanaan sensus, penegakkan peraturan baru tentang pergerakan orang dan barang, menginformasikan penduduk, melaksanakan propaganda di tingkat individu masyarakat, mengumpulkan informasi intelijen tentang oknum insurjen, serta membantu dalam penerapan dan pelaksanaan berbagai reformasi ekonomi dan sosial, serta fungsi-fungsi administratif/sipil lainnya²⁴.

²⁴ David Galula, *Counterinsurgency Warfare: Theory & Practice* (New York: Praeger, 1964), p. 67



Gambar 1 Bagan Depiksi Sinergitas Ke-3 Elemen Upaya Kontra-Insurjensi. Sumber: Kilcullen didalam Rich & Duyvesteyn (2012, p.143)

Kilcullen berpendapat bahwa upaya kontrainsurjensi (khususnya di dalam mengatasi faksi bersenjata) memiliki 3 elemen utama yang saling berkaitan yaitu operasi militer ofensif, rekonsiliasi & pembangunan perdamaian, dan pengamanan populasi²⁵.

- 1) Operasi militer ofensif (counter network) lewat aksi penindakan dengan menggunakan operasi-operasi khusus guna menindak jaringan kelompok insurjen (khususnya terhadap aktor insurjen garis keras yang tidak dapat di persuasi untuk meletakkan senjata). Pelaksanaan *counter-network targeting* secara efektif memerlukan kapabilitas pengumpulan dan diseminasi intelijen yang tepat waktu,

²⁵ David Kilcullen, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," in *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, ed. Paul B. Rich and Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 2012), p. 128 - 154

- serta kapabilitas pasukan yang mumpuni di dalam melaksanakan tindakan-tindakan khusus seperti pengintaian jarak dekat dan penindakan langsung (direct action) terhadap sasaran terpilih.
- 2) Rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian dengan persuasi dan mengkooptasi eks-insurjen agar masuk kedalam pihak pemerintah. Pelaksanaan rekonsiliasi dan upaya kooptasi eks-insurjen kedalam pemerintahan pada umumnya menekankan pada penggunaan kapabilitas-kapabilitas non-militer seperti kapabilitas politik serta kapabilitas informasi. Kapabilitas politik mencakup kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan/ membuktikan legitimasi pemerintahan yang ada kepada eks insurjen . Kapabilitas informasi dibutuhkan guna menginformasikan serta mempengaruhi pihak insurjensi beserta pendukungnya agar meninggalkan tujuan insurjensi mereka dan bergabung atau berbalik mendukung pemerintah (kontrainsurjen).
 - 3) Pengamanan populasi sehingga efek insurjensi (baik upaya penggalangan maupun intimidasi dari insurjen) terhadap kegiatan sehari-hari warga dapat diminimalisir . Guna melaksanakan tindakan pengamanan populasi secara efektif, diperlukan suatu unit statis yang tinggal bersama atau berdekatan dengan pemukiman penduduk untuk melindungi wilayah dan populasi serta menggalang dukungan. Dikarenakan proksimitas unit-unit statis tersebut dengan masyarakat didalam pelaksanaan operasi pengamanan, diperlukan suatu kompetensi terkait pemahaman akan dinamika kehidupan, demografi, dan karakteristik populasi serta wilayah guna menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan dukungan populasi terhadap pihak kontra insurjen.

Hasil dan Pembahasan

Insurjensi separatis di Papua menggunakan tindakan politik serta perang berlarut/ gerilya mencapai tujuan politiknya. Tindakan politik yang dilakukan oleh gerakan separatis Papua mencakup mobilisasi massa, subversi, demonstrasi, hasutan kekerasan, propaganda, serta diplomasi internasional dengan organisasi negara dan non-negara yang mendukung/simpatis terhadap gerakan separatis Papua²⁶. Organisasi politik utama dari gerakan ini adalah KNPB - Komite Nasional Papua

²⁶ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storage/services/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

Barat (yang sebagian besar melakukan aksi politik dalam negeri, mobilisasi dan protes massa), dan ULMWP – *United Liberation Movement of West Papua* (bertanggung jawab atas pelaksanaan diplomasi dan negosiasi internasional dengan entitas negara dan non-negara)²⁷. Strategi politik/non-kekerasan yang dilakukan oleh separatis Papua meliputi aksi:

1. Penyebaran berita terkait aksi dan tujuan politik yang ingin dicapai serta upaya-upaya untuk menginternasionalisasi konflik untuk meraih dukungan dan simpati dari masyarakat internasional.
2. Penggalangan dukungan lewat diplomasi pada level sub-regional, regional dan internasional untuk mewujudkan agenda *self-determination* atau jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri.
3. Mengupayakan agar terjadi suatu “zona darurat” di Papua dengan melakukan provokasi sehingga mengakibatkan peningkatan intensitas kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia secara massal yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini diharapkan dapat memicu intervensi internasional yang kemudian memfasilitasi referendum.
4. Mengeksploitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan berpengaruh untuk menggalang dukungan dan menggiring opini massa.

Tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis Papua pada umumnya adalah penghadangan, penyerangan pos penyerangan pos TNI atau Polisi, penyerangan dan sabotase terhadap instalasi atau infrastruktur vital, tembakan gangguan, penculikan & pembunuhan terhadap warga sipil²⁸. Tujuan dari aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan adalah untuk:

1. Melakukan peperangan atrisi terhadap aparat keamanan.
2. Melakukan teror dan intimidasi terhadap penduduk serta aparat pemerintah agar bertindak/bereaksi secara menguntungkan bagi tujuan separatis (seperti; penghentian kegiatan administrasi pemerintah & operasi penanggulangan insurjensi, menurunnya rasa aman & kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam menjamin keamanan, serta untuk memprovokasi reaksi berlebihan dari pasukan keamanan pemerintah).

²⁷ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storage-services/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

²⁸ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 33-35

3. Merusak sarana-prasarana serta infrastruktur.

Sayap bersenjata separatis Papua disebut sebagai TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang terdiri atas berbagai faksi/ kelompok yang masing-masing beroperasi pada wilayah-wilayah tertentu yang seringkali tidak berkoordinasi baik dengan sesama kelompok sayap bersenjata maupun organisasi politik separatis²⁹.

Tindak kekerasan dan gangguan keamanan di wilayah Papua terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagian besar wilayah yang mengalami tindak kekerasan berada di dataran tinggi³⁰.

Daerah dengan tingkat kekerasan yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir seperti yang didefinisikan di Gambar 2, persebaran tindak kasus kekerasan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika (58 kasus), Intan Jaya (58 kasus), Puncak (53 kasus), Nduga (40 kasus), dan Puncak Jaya (38 kasus). Peningkatan intensitas kekerasan tertinggi di Kabupaten Mimika, Intan Jaya dan dan Puncak baru terjadi di dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan daerah dengan kekerasan sedang atau dengan 6 sampai 10 kasus dalam satu dekade terakhir, antara lain Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, dan Jayapura³¹. Daerah dengan tingkat kekerasan yang rendah atau kurang dari lima kasus, antara lain Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Fakfak, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Manokwari, Mappi, Maybrat, Merauke, Paniai, Sorong, Teluk Bintuni, Waropen, Yalimo, dan Kota Sorong³².

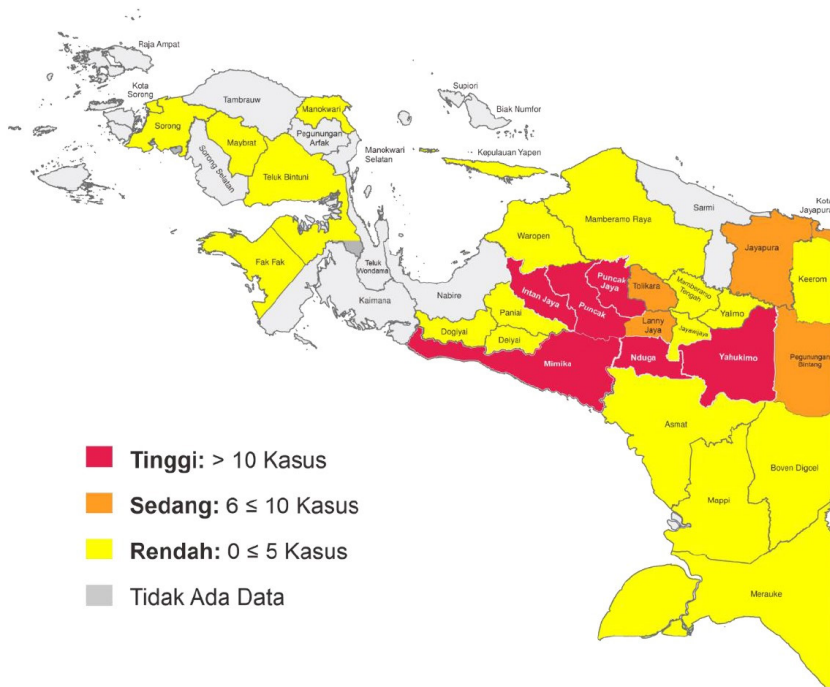
²⁹ Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015), p.2, <https://tile.loc.gov/storage/services/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>

³⁰ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 19

³¹ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 18

³² Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 18

Sebaran Area Konflik di Papua



Gambar 2 Peta Sebaran Area Konflik di Papua

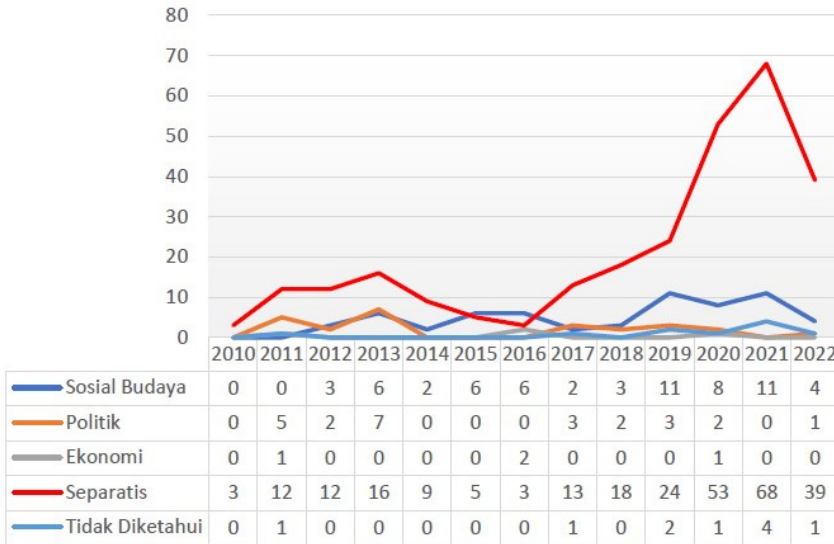
Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.19)

Motif kekerasan yang mengakibatkan gangguan keamanan di wilayah Papua dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu motif separatisme, politik lokal, konflik sosial budaya, dan konflik ekonomi³³. Motif kekerasan terbanyak yang terjadi di wilayah Papua adalah motif separatisme dengan total 275 kasus yang kebanyakan menysasar aparat keamanan. Selain itu, lebih dari setengah jumlah kasus kekerasan bermotif separatisme (160 kasus) terjadi dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (2020-2022)³⁴.

³³ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 20

³⁴ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 21

Motif Kekerasan di Papua (Januari 2010 - Agustus 2022)



Gambar 3 Motif Kekerasan di Papua (Januari 2010 - Agustus 2022). Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.21)

Aksi kekerasan bermotif separatisme yang terjadi selama periode 2010 - 2022 telah mengakibatkan korban 244 orang terluka dan 258 orang tewas. Di antara mereka yang terluka, termasuk 80 petugas TNI, 46 petugas POLRI, 104 warga sipil, dan 14 separatis. Sementara itu, yang meninggal terdiri dari 61 perwira TNI, 27 perwira POLRI, 127 warga sipil, dan 43 separatis. Dalam enam tahun terakhir, kekerasan dengan motif separatis terjadi di tempat-tempat terbuka, pos polisi atau militer, perusahaan, dan bahkan terdapat serangan terhadap pesawat/helikopter³⁵. Pada semester I tahun 2023 (bulan Januari sampai dengan Juli) sudah terdapat 75 kasus penyerangan dengan estimasi korban jiwa berjumlah 15 - 17 orang yang terdiri dari prajurit TNI-Polri dan warga sipil³⁶.

³⁵ Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), p. 24

³⁶ Abdul Malik Mubarak, "Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas," *SindoneWS*, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindoneWS.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>



Gambar 4 Jumlah Korban Kekerasan Akibat Motif Separatisme
 Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2023, p.22)

Keberhasilan insurjen dalam melakukan berbagai aksinya tersebut bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat (domestik dan internasional) bahwa; 1) insurjen memiliki kemampuan yang cukup untuk memperdaya dan mengatasi aparat pemerintah khususnya TNI/Polri, 2) menunjukkan eksistensinya yang menyiratkan bahwa pihak insurjensi cakap dan sudah selayaknya mendirikan pemerintahan dan negara sendiri, 3) untuk mengintimidasi masyarakat lokal agar tidak berpihak/ membantu pemerintah³⁷.

Dengan karakteristik insurjensi tersebut, pemerintah dalam hal ini TNI perlu mengembangkan beberapa bentuk kapabilitas untuk secara efektif menanggulangi gerakan insurjensi. J.S Prabowo (2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk operasi militer yang dapat dilakukan oleh TNI untuk mendukung upaya kontra insurjensi³⁸. Masing-masing operasi tersebut membutuhkan unsur pelaksana dan pendukung yang memiliki kapabilitas-kapabilitas tertentu.

³⁷ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 36

³⁸ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 11

Kapabilitas Institusi Pendukung

Pelaksanaan operasi militer atau penggunaan kekuatan militer untuk menanggulangi insurjensi perlu ditunjang beberapa bentuk kapabilitas institusi yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi militer yang meliputi kapabilitas pemerintahan, manajemen lembaga, sinergitas komando & pengendalian, logistik, serta sistem peradilan & penegakan hukum³⁹.

1) Kapabilitas *civil governance* atau pemerintahan

Kapabilitas *civil governance* atau pemerintahan yang efektif dan efisien berdampak langsung terhadap citra/ persepsi masyarakat terkait legitimasi pemerintah. Pemerintahan yang efektif dan tanggap akan memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat sehingga memudahkan upaya-upaya penggalangan dukungan dari masyarakat yang dapat membantu upaya-upaya militer dalam mengatasi insurjensi.

2) Kapasitas manajemen kelembagaan

Kapabilitas pasukan keamanan sangat bergantung pada institusi atau struktur institusional yang berwenang di atasnya. Struktur institusional dalam hal ini pemerintah sipil bertanggung jawab dan harus memiliki kontrol penuh atas kompetensi dan perilaku pasukan keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks kontra insurjensi, efektivitas dan legitimasi suatu pemerintah beserta aparatur keamanannya sangat bergantung/ dipengaruhi oleh otoritas/ institusi sipil yang menaunginya.

Pada tingkat praktis/ pelaksana, kapabilitas institusi sipil yang memiliki otoritas atas perangkat atau aparatur keamanan sangat berpengaruh terhadap perencanaan, pengarahannya, dan pendanaan pelatihan, perlengkapan, struktur, dan penggunaan kekuatan aparatur keamanan tersebut (yang mencakup kepolisian/ penegakan hukum, serta unsur-unsur militer).

3) Komando dan pengendalian yang selaras/ bersinergi

Kontra Insurjensi merupakan upaya terkoordinasi dan melibatkan kerjasama antar berbagai lembaga dan instansi di dalam pemerintahan. Dikarenakan terdapat berbagai unsur pelaksana yang terdiri atas aparatur sipil/ pemerintahan serta aparat

³⁹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 179-187

keamanan yang masing-masing memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda, harus ada suatu sistem komando dan pengendalian yang dapat menyelaraskan upaya-upaya (aksi taktis) dari unsur pelaksana tersebut agar menghasilkan suatu efek strategis yang relevan dengan tujuan politik yang ingin dicapai atau kebijakan yang ingin diterapkan.

4) Logistik

Logistik dalam penanggulangan insurjensi mencakup penyediaan makanan, bahan bakar, suku cadang, dan amunisi; serta pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana; dan pengelolaan material, aliran, fasilitas, dan sistem yang menghasilkan logistik yang tanggap. Di dalam konteks penanggulangan insurjensi di wilayah Papua, logistik juga mencakup penyediaan faktor-faktor di atas bagi warga sipil di wilayah atau daerah yang terdampak insurjensi yang pada umumnya merupakan daerah terpencil. Kelancaran logistik tersebut, selain berpengaruh terhadap efektivitas operasi militer, juga sangat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari warga setempat.

5) Sistem peradilan dan penegakan hukum

Gompert & Gordon IV (2008) menyatakan bahwa tanpa sistem peradilan yang memadai dan efisien, pelanggaran hukum tidak dapat ditangani secara proporsional. Sistem peradilan yang tidak proporsional, adil, dan transparan dapat digunakan oleh pihak insurjen untuk meyakinkan suatu segmen populasi bahwa negara (pihak kontra insurjen) berperilaku diskriminatif dan tidak berpatokan pada sistem penegakan hukum yang adil. Tanpa suatu kejelasan sistem peradilan, kerjasama dan tindakan kooperatif dari masyarakat untuk mewujudkan situasi aman akan sulit tercapai. Oleh sebab itu legitimasi aparat pemerintah sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi dari sistem peradilan dan penegakan hukum baik terhadap warga sipil maupun aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum.

Kapabilitas di dalam pelaksanaan operasi militer

Kapabilitas militer yang dibutuhkan dalam penanggulangan insurjensi sangatlah berbeda dari kapabilitas militer yang diperlukan dalam operasi militer konvensional. Operasi militer di dalam konteks penanggulangan insurjensi dapat dikelompokkan kedalam 4 bentuk

kegiatan/ tindakan yaitu operasi tempur, intelijen, operasi pengamanan, serta territorial⁴⁰. Masing-masing bentuk operasi militer tersebut memerlukan kapabilitas-kapabilitas tertentu agar menjamin efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan operasi.

1) Operasi Tempur

Operasi tempur di dalam konteks penanggulangan insurjensi cenderung berbeda dengan operasi tempur di dalam menghadapi musuh konvensional yang dimana pertempuran yang terjadi seringkali non-linier atau irregular serta daya tempur yang relatif berbeda. *Engagement* atau kontak tembak yang terjadi antara insurjen dan pasukan pemerintah pada umumnya terjadi secara spontan dan diinisiasi oleh pihak insurjen. Guna mengatasi hal tersebut, pihak kontra insurjen perlu menekankan penggunaan metode operasi yang memiliki unsur kejutan seperti penghadangan dan penyergapan. Agar efektif, diperlukan pasukan-pasukan terlatih yang *mobile* atau dapat menavigasi medan sulit serta terlatih didalam taktik *raid*.

Adapun beberapa kapabilitas yang perlu dimiliki oleh TNI agar efektif dalam pelaksanaan operasi tempur yaitu;

1.1) Kemampuan intelijen

Pelaksanaan *counter-network targeting* secara efektif memerlukan kapabilitas pengumpulan dan diseminasi intelijen yang tepat waktu⁴¹. Kapabilitas untuk menemukan dan memantau gerakan dan aktifitas insurjen sangat penting – dan sulit karena insurjen biasanya mengenakan pakaian sipil, beroperasi dalam tim kecil yang tersebar, serta biasanya tidak menggunakan peralatan militer yang mudah diidentifikasi, dan sering bersembunyi di pemukiman penduduk/ di antara warga sipil.

1.2) Mobilitas udara taktis

Pasukan keamanan yang terlibat dalam pemberantasan insurjensi seringkali memerlukan mobilitas udara. Insurjen biasanya memiliki inisiatif taktis (yaitu, mereka dapat dengan leluasa memutuskan kapan dan di mana akan melakukan serangan). Selain itu, pihak insurjen juga sering mengeksploitasi wilayah terpencil yang memiliki karakteristik medan yang sulit untuk

⁴⁰ Johannes Suryo Prabowo, *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013), p. 11

⁴¹ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

dinavigasi/ dilalui dengan jalur darat. Oleh sebab itu pasukan kontra-insurjen memerlukan mobilitas udara agar tanggap terhadap perubahan situasi⁴².

1.3) Pasukan dengan kemampuan khusus didalam penangkapan/ penindakan HVT (*High Value Target*) opspur

Kapabilitas pasukan yang mumpuni di dalam melaksanakan tindakan-tindakan khusus seperti pengintaian jarak dekat dan penindakan langsung (*direct action*) terhadap sasaran terpilih sangat krusial di dalam upaya penangkapan insurjen⁴³. Pasukan dengan kapabilitas khusus dapat melaksanakan tugas/ fungsi militer yang tidak sesuai atau tidak mampu dilaksanakan oleh pasukan konvensional ataupun polisi. Kapabilitas tersebut memungkinkan pasukan-pasukan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengintaian sasaran dengan risiko tinggi atau pengintaian jarak dekat, operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, dan penindakan langsung (*direct action*) terhadap sasaran terpilih (misalnya sasaran berupa unsur komando dan pengendalian pihak insurjen). Pasukan dengan kemampuan-kemampuan khusus tersebut juga dapat digunakan didalam aksi-aksi lintas perbatasan yang menyasar area-area persembunyian insurjen yang berada di luar wilayah negara.

2) Operasi Intelijen

Di dalam kontra insurjensi, operasi intelijen diselenggarakan untuk menggalang dukungan masyarakat serta mendapatkan data-data relevan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan penduduk lokal⁴⁴. Upaya penggalangan yang efektif harus disertai dengan implementasi kebijakan dan program yang memiliki dampak *tangible*. Guna melaksanakan pengumpulan data relevan, diperlukan kapabilitas intelijen baik kapabilitas teknis lewat platform ISR/IPP maupun kemampuan pembangunan jaringan HUMINT di daerah sasaran⁴⁵. Operasi intelijen

⁴² David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 191

⁴³ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 193

⁴⁴ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

⁴⁵ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*

di dalam penanggulangan insurjensi dilakukan baik di tataran strategis (dengan fokus menghadapi insurjen pada front politik dan diplomatik), dan tataran taktis yang bertujuan untuk merebut simpati masyarakat lokal serta untuk mengetahui *plans & intentions* front bersenjata dan jaringan klandestin insurjen di daerah.

3) Operasi Pengamanan

Pengamanan populasi dapat dicapai lewat penyelenggaraan operasi pengamanan yang melibatkan kekuatan militer di dalam mengamankan wilayah-wilayah berpenduduk serta infrastruktur kritis yang dapat menjadi target serangan kelompok insurjensi. Dengan pengamanan populasi dan infrastruktur, pihak kontra insurjen dapat membatasi gerakan insurjensi serta memotong akses/ koneksi insurjen terhadap populasi sehingga memudahkan upaya penggalangan dukungan (hati dan pikiran) target populasi oleh pihak kontra insurjensi. Kapabilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pengamanan antara lain kemampuan intelijen dan kemampuan penyelenggaraan pengamanan perbatasan.

3.1) Kemampuan intelijen

Walaupun cenderung statis, pengamanan populasi membutuhkan informasi intelijen khususnya informasi terkait pergerakan dan aktifitas insurjen yang mungkin tinggal di pemukiman tersebut serta *plans & intentions* yang mungkin akan dilaksanakan.

3.2) Kemampuan menyelenggarakan pengamanan perbatasan

Keamanan wilayah perbatasan memiliki dampak yang besar terhadap upaya kontra insurjensi. Wilayah pemukiman penduduk, khususnya yang terletak di dekat perbatasan suatu wilayah dapat menjadi sangat rentan bilamana penjagaan di wilayah perbatasan cukup lengah serta terdapat indikasi adanya suatu wilayah aman atau *sanctuary area* di dalam wilayah negara lain yang sulit diakses oleh pihak kontrainsurjen⁴⁶. Penjagaan perbatasan yang lemah serta adanya wilayah aman diluar batas wilayah negara memungkinkan keleluasaan transportasi logistik dari wilayah-wilayah aman tersebut ke daerah pemukiman masyarakat yang sedang diamankan. Oleh sebab itu, kapabilitas pengamanan dan pengadministrasian wilayah perbatasan sangat penting.

(Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 188-189

⁴⁶ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 190-191

4) Operasi Territorial

Bentuk lain dari penggunaan kekuatan TNI dalam menanggulangi insurjensi adalah lewat penyelenggaraan operasi teritorial. Operasi teritorial merupakan Operasi yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci untuk mencapai suatu tugas secara khusus yang ditetapkan atas dasar perintah dan komando atasan yang berwenang dalam rangka menegakkan dan memelihara kewibawaan pemerintah⁴⁷. Operasi teritorial di dalam penyelenggaraan kontra insurjensi bertujuan untuk membangun kedekatan dengan penduduk lokal guna mendapatkan simpati dan dukungan populasi terkait. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan aparat teritorial dalam menguasai budaya dan bahasa lokal serta kepekaannya terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat sehingga dapat merancang suatu bentuk program yang dapat membantu masyarakat setempat⁴⁸.

Penutup

Penanggulangan insurjensi di Indonesia khususnya penanggulangan gerakan separatis bersenjata di wilayah Papua sering terkendala beberapa faktor diantaranya; belum adanya sinergitas komando & pengendalian, mekanisme pengawasan serta metrik/ indikator efektivitas, faktor genealogi seperti loyalitas etnis/ suku yang menghambat upaya intelijen serta penindakan terhadap insurjen, serta kondisi medan/ geografis yang sulit untuk dinavigasi oleh aparat yang digunakan oleh insurjen untuk bersembunyi. Kendala-kendala tersebut menuntut pihak kontra insurjen (dalam hal ini pemerintah) untuk beradaptasi dengan membentuk serta mengembangkan kapabilitas efektif yang mencakup kapabilitas institusi pendukung dan kapabilitas pelaksanaan operasi militer.

Kapabilitas institusi pendukung memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan & menyatukan fungsi komando dan pengendalian dalam operasi kontra insurjensi, serta mengelola dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas unit/organisasi yang terlibat dalam upaya kontra insurjensi. Agar merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu

⁴⁷ TNI AD, *Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD*. (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/106/XII/2011, 2011)

⁴⁸ David Gompert, and John Gordon IV, *RAND Counterinsurgency Study Final Report - War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency* (Santa Monica: RAND Corporation, 2008), p. 40-41, 43-48

memiliki administrasi pemerintahan sipil yang kompeten, kemampuan manajemen dan evaluasi lembaga, sistem peradilan dan penegakan hukum yang proporsional, serta kapabilitas dalam menyelaraskan komando dan pengendalian instrumen nasional yang digunakan dalam kontra insurjensi.

Kapabilitas institusi pendukung yang memadai akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan operasi militer kontra insurjensi. Pemerintahan sipil yang kompeten dan cermat dalam mengelola & mengevaluasi kinerja organisasi-organisasi di bawahnya (termasuk organisasi militer) memberikan kesan legitimasi dan kontrol sipil. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi adaptasi & pengembangan organisasi militer dan menjadi landasan bagi akuisisi kapabilitas spesifik yang sesuai tuntutan operasi militer di dalam konteks kontra insurjensi, khususnya kapabilitas yang berkaitan dengan fungsi intelijen yang efisien & efektif, mobilitas udara taktis, keterampilan manajemen teritorial, serta *targeting* yang tepat terhadap kelompok insurjensi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Akuisisi kapabilitas-kapabilitas tersebut memfasilitasi pelaksanaan operasi militer dan penggunaan kekuatan *lethal* oleh militer secara tepat, diskriminatif, dan proporsional. Hal ini memungkinkan militer untuk secara akurat melaksanakan aksi ofensif terhadap para insurjen, melindungi populasi dan infrastruktur kritis, sekaligus meminimalkan *collateral damage* dan kematian warga sipil yang tentunya dapat dieksploitasi oleh kelompok/ sayap politik separatis untuk kepentingan politiknya.

Daftar Pustaka

- Aribowo, Stefanus, S. *Strategi Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua guna Mendukung Pertahanan Negara*. Jakarta: Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022.
- Djopari, Johannes, R.G. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Galula, David. *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Praeger, 1964.
- Gompert, David, and Gordon IV, John. *RAND Counterinsurgency Study Final Report – War by Other Means: Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency*. Santa Monica: RAND Corporation, 2008.

- Gray, Colin, S. *The Strategy Bridge: Theory for Practice*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Kilcullen, David. *Counterinsurgency*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Prabowo, Johannes Suryo. *Operasi Militer dalam Operasi Lawan Insurjensi*. Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2013.
- Prabowo, Johannes Suryo. *Serangan dalam Operasi Lawan Insurjensi*. Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2011.
- Rich, Paul, B, and Duyvesteyn, Isabelle. *The Routledge Handbook of Insurgency and Counter Insurgency*. New York: Routledge, 2012.
- Singh, Bilveer. *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. New York: Routledge, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV, 2013
- Kilcullen, David, "Counterinsurgency: The State of a Controversial Art," In *Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency*, edited by Rich, Paul, B, and Duyvesteyn, Isabelle, 128 - 54. New York: Routledge, 2012.
- Ucko, David, dan Marks Thomas, A. *Crafting Strategy for Irregular Warfare: A Framework for the Analysis and Action Second Edition*. Washington DC: NDU Press, 2022.
- US Government/ Central Intelligence Agency, *A Guide to the Analysis of Insurgency* (2012), <https://www.hsdl.org/?view&did=713599>
- Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* (2015). <https://tile.loc.gov/storage/services/service/gdc/gdcovop/2017344154/2017344154.pdf>
- Lykke Jr, Arthur, F, "Defining Military Strategy." *Military Review*, 100, no. 5 (May 1989): 2-8.
- Taliaferro, Aaron C., Lina. M Gonzalez, Mark Tillman, Pritha Ghosh, Paul Clark, and Wade Hinkle. "Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP)." (February 2019): 1-4. <https://www.jstor.org/stable/resrep22853.4>

Instansi Pemerintah

- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

TNI AD. *Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD*. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/106/XII/2011, 2011.

TNI AD. *Kajian Triwulan IV:Kesiapan TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Asimetris*. Bandung: Seskoad, 2010.

“Daftar Anggota TNI-Polri Tewas di Papua Sejak Februari Perangi KKB.” *CNN*, April 13, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418173446-20-939479/daftar-anggota-tni-polri-tewas-di-papua-sejak-februari-perangi-kkb/2>

“13 Anggota TNI - Polri Gugur di Papua Selama 2022, Warga Sipil Meninggal 35 Orang.” *Liputan6*, Desember 29, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5166206/13-anggota-tni-polri-gugur-di-papua-selama-2022-warga-sipil-meninggal-35-orang>

“Daftar Personel TNI dan Polri yang Gugur di Papua Sejak 2020.” *BeritaSatu*, Januari 27, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=wEmjep9GkIs>

Mubarok, Abdul Malik. “Deretan Penyerangan KKB Papua sejak Awal 2023, 11 Prajurit TNI-Polri Gugur, 3 Warga Sipil Tewas.” *Sindonews*, Mei 1, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/1085051/14/deretan-penyerangan-kkb-papua-sejak-awal-2023-11-prajurit-tni-polri-gugur-3-warga-sipil-tewas-1682867096>

Agung, Gregorianus. “Selama Januari Hingga Juni, KKB Papua Tewaskan 17 Orang Enam Diantaranya Anggota TNI.” *Netitalk*, Juli 2, 2023. <https://www.netitalk.com/news/10129340223/selama-januari-hingga-juni-kkb-papua-tewaskan-17-orang-enam-diantaranya-anggota-tni>

